

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika Perdesaan di Indonesia telah mengundang perhatian dari berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, perusahaan hingga lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Aktivitas pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan berbagai model dan nilai-nilai untuk memperkuat prinsip pembangunan perdesaan.

Tidak jarang orang menganggap desa adalah tempat kumuh yang tidak memiliki potensi yang bisa diandalkan. Namun saat ini yang menjadi hambatan yakni kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, dimana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*), yang ketiga ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat *parokial* atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam konteks demokrasi lokal. Pengembangan basis ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang

menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah-satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. ¹

Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Salah-satu lembaga yang akan membangun dan menopang perekonomian masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes yang didefinisikan Pasal 1 ayat 6 UU No. 6/2014 tentang Desa, sebagai:

*“Badan Usaha Milik Desa, Selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa“.*² BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa.

BUMDes merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai

¹ Departemen Pendidikan Nasional Piset kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). Hlm. 1

² Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta : Kementrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 5

lembaga sosial (*social instution*) dan komersil (*commercial instution*).³ Pada konteks ini BUMDes merupakan lembaga yang memprioritas kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat desa. Tujuan dari dibentuknya BUMDes adalah sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan program pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan.

Dalam pengelolaan BUMDes ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yakni; *Pertama*, Masyarakat menganggap bahwa dana BUMDes tidak begitu penting. Masyarakat awam ada yang belum memahami tentang dana BUMDes apalagi belum ada sosialisai tentang BUMDes, dan dana BUMDes. Sehingga masih ada sebagian masyarakat yang menganggap dana BUMDes hanya dana biasa saja yang mereka anggap uang tersebut adalah uang masyarakat yang diterima tanpa harus di kembalikan oleh mereka kepada pengurus BUMDes, sehingga dana simpan pinjam dalam program BUMDes sedikit terhambat. Karena dana yang diperentukkan kepada masyarakat secara bergilir belum berjalan dengan baik, meskipun masih banyak sebagian masyarakat yang menganggap dana BUMDes untuk mereka bukan untuk digulirkan di masyarakat dan

³ Gabriela Hanny Kususma dan Nurul Purnamasari. 2016. *BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan*. Jogjakarta; Penabulu Foundation. Hlm. 2

ujungnya dana tersebut mengalami kemacetan.⁴

Kedua, sumber daya manusia rendah, salah satu hambatan pengurus desa dan pengurus BUMDes yaitu kurangnya sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas dan berpendidikan akan memperlambat kemajuan perkembangan BUMDes karna perkembangan BUMDes lain di setiap desa akan terus mengalami kemajuan yang sangat baik karna sumber daya manusia yang berniali tinggi akan mendukung perkembangan suatu program kegiatan BUMDes.⁵

Perihal BUMDes, sebenarnya sudah ada beberapa yang telah melakukan penelitian, misalnya penelitian yang dilakukan Benny Ferdianto di Desa Tiyuh Candra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang, di mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian, peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah dikatakan meningkat, walaupun dari tahun ke tahun ada mengalami peningkatan dan penurunan. Maka peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa dapat dilihat dari beberapa faktor yakni; peranan BUMDes sebagai fasilitator dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), peranan BUMDes sebagai mediator dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes), peranan BUMDes sebagai motivator dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes), peranan BUMDes sebagai Dinamistor dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes).⁶

⁴ Depertemen pendidikan nasional pusat kajian dinamika sistem pembagunan (PKDSP) fakulatas Ekonomi Universitas Brawijaya , 2007 Buku Paduan Dan Pengelolaan Badan Usaha

⁵ *Loc.cit*

⁶ Benny Ferdianto, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Skripsi, 2016

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Fajrawati di Desa Pagendangan Kecamatan Pagendangan, Kabupaten Tangerang di mana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kontribusi badan usaha milik desa (BUMDes) desa Pagendangan kecamatan Pagendangan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi antara lain melalui pemberian dana pinjaman, dan konsultasi dalam mengelola usaha. Kontribusi BUMDes kepada masyarakat telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka dibanding sebelum mendapat pinjaman, konsultasi, dan bimbingan BUMDes.⁷

Pada konteks ini peneliti ingin mengungkap terkait permasalahan BUMDes di Desa Batuloreng, Kecamatan Bongomeme. Peneliti ingin mengungkap terkait permasalahan BUMDes di Desa Batuloreng Kecamatan Bongomeme. Peneliti akan melihat bagaimana optimalisasi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Provinsi Gorontalo memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian dan kelautan. Potensi ini paling banyak terdapat di wilayah pedesaan. Dengan adanya potensi ini sesungguhnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa melalui pengelolaan BUMDes. Bagi pemerintah dan masyarakat Gorontalo yang sebagian besar bergerak pada bidang pertanian dan menjadi sandaran bagi sebagian besar masyarakatnya terutama yang tinggal di pedesaan hidup dari sektor itu, sehingga

⁷ Fajrawati, *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*, Skripsi, 2016

dapat dikatakan bahwa betapa penting nilai kebutuhan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Alasannya Daerah Gorontalo sangat subur, dan tenaga kerja lebih banyak di pertanian, hal ini akan menjadikan bidang pertanian menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Batuloreng adalah desa yang berada di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Masyarakat Desa Batuloreng mayoritas bekerja sebagai petani. Hal ini berarti bahwa tingkat ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan rendah karena tingkat pendapatan yang tidak pasti, hanya ditentukan dengan hasil panen yang terkadang tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut tentu menghambat pertumbuhan perekonomian desa, oleh karena itu, upaya pemerintah daerah sangat diperlukan untuk membantu perekonomian masyarakat desa melalui bantuan-bantuan program pembangunan pedesaan/desa, namun bantuan tersebut pada umumnya hanya berbentuk bantuan yang bersifat langsung, dalam artian berbentuk beras atau uang tunai yang langsung habis untuk dikonsumsi saja tidak berbentuk modal usaha atau modal keterampilan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, hal tersebut justru menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan yang mengakibatkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Batuloreng, maka dibentuklah BUMDes. Pendirian BUMDes Desa Batuloreng

dilatar belakangi oleh masyarakat dan potensi desa yang ada. Maksud dari potensi desa adalah adanya kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa dalam bidang pertanian. Pada awal pembentukan, BUMDes Desa Batuloreng ini memiliki 3 (tiga) program unit usaha yang dijalankan diantaranya Unit Saprotan/penyedia pupuk, Unit Waserda/warung serba ada, dan terakhir unit Usaha Jasa Sewa Tenda/perengkapan pesta. Namun salah satu diantaranya yaitu Unit Usaha Jasa Sewa Tenda/perengkapan pesta selalu mengalami hambatan dan kendala sehingga tidak dapat berjalan dengan baik, dan pada akhirnya BUMDes Desa Batuloreng memutuskan untuk berhenti menjalankan Unit Usaha Jasa Sewa Tenda tersebut.

Desa Batuloreng memiliki 4 (empat) dusun yang sebagian besar masih berada di wilayah yang memiliki beragam macam potensi pertanian yang masih belum dikelola dengan baik. Dari luas wilayah 13,20 Ha, dan memiliki kurang lebih 1152 jiwa terdiri dari perempuan dan laki-laki yang profesinya sebagian besar adalah petani. Namun dari hasil pengamatan tentang BUMDes Desa Batuloreng, dalam hal ini program unit usaha *Saprotan* atau “Sarana Produksi Pertanian” yang menjalankan kegiatan dalam bidang penyediaan sarana produksi pertanian berupa pupuk, herbisida/racun rumput, dan alat pertanian untuk memenuhi kebutuhan para petani khususnya di sekitar wilayah Desa Batuloreng mengalami banyak permasalahan dibidang pemberian modal karena rumitnya pengurusan untuk peminjaman modal dibidang usaha pertanian yang seringkali menjadi penghambat majunya usaha BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa

tujuan dan peran BUMDes masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan hasil pertanian. Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Batuloreng dengan alasan bahwa desa ini memiliki potensi yang baik dalam hasil pertanian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus masalah yang dapat dijadikan penelitian adalah :

Bagaimana optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Batuloreng, Kecamatan Bongomeme ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis optimalisasi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Di Desa Batuloreng.

1. 4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang pendidikan di luar sekolah khususnya dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. Bagi penulis sendiri menambah pengetahuan tentang penting lembaga ekonomi melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan potensi dan meningkatkan perekonomian masyarakat atau referensi penelitian yang akan datang.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi pemerintah dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terutama dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)